

## PEMROV RIAU SIAP DUKUNG STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025



Sumber gambar:

[https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/pemprov-riau-siap-dukung-strategi-p.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pemprov-riau-siap-dukung-strategi-p.jpg)

Pemerintah Provinsi Riau melakukan Rapat Koordinasi secara virtual Dengan Menteri Dalam Negeri, dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan dari instansi vertikal dan stakeholder terkait yang ada di seluruh Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Riau, pada Senin (19/5/2025). Bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam merumuskan strategi konkret pengendalian inflasi, khususnya menjelang periode strategis tahun 2025.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim tanam-panen.

Beberapa langkah yang dibahas antara lain penguatan ketahanan pangan daerah, optimalisasi anggaran untuk program pengendalian inflasi, serta pelaksanaan operasi pasar

secara berkala. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus melakukan monitoring harga dan stok barang secara real time melalui sistem digital yang terintegrasi.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan setiap daerah memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur dalam menekan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga berkomitmen memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada daerah dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Elly Wardhani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penuh langkah-langkah konkret yang telah diarahkan oleh pemerintah pusat. Termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor, penguatan data pangan, serta peningkatan efektivitas program subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Elly juga menambahkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong setiap kabupaten/kota di Riau untuk segera menyusun langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

“Penting bagi kita semua untuk menjaga kestabilan harga, terutama bahan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami juga akan memperkuat sinergi dengan TPID di tingkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program pengendalian inflasi berjalan optimal,” ujar Elly.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau akan terus memperkuat sistem pemantauan harga dan distribusi barang, serta memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan respon cepat terhadap potensi gejolak harga di pasar. Dengan upaya bersama, diharapkan inflasi di Riau dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat," tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/91480/pemprov-riau-siap-dukung-strategi-pengendalian.html>, “Pemprov Riau Siap Dukung Strategi Pengendalian Inflasi Tahun 2025”, 19 Mei 2025;
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/920080/pemprov-riau-siap-jalankan-langkah-konkret-pengendalian-inflasi-2025>, “Pemprov Riau Siap Jalankan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi 2025”, 19 Mei 2025;

3. <https://www.riauin.com/read-45600-2025-05-19-pemprov-riau-komit-dukung-langkah-pengendalian-inflasi-nasional-2025.html>, “Pemprov Riau Komit Dukung Langkah Pengendalian Inflasi Nasional 2025”, 19 Mei 2025.

### **Catatan:**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun, untuk bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*) dengan tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:

- a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
- b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
- c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

### **Pengukuran IHK**

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;
2. Kelompok pakaian dan alas kaki;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok transportasi;

7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;
9. Kelompok pendidikan;
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Mengutip Berita Resmi Statistik No.23/04/Th.XXVII, tanggal 1 April 2024 Pada Maret 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Maret 2024 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Maret 2024 sebesar 0,93 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2024 sebesar 1,77 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,23 persen; dan inflasi y-to-d sebesar 0,57 persen.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau